



Reviu Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024

Nomor : W28-U6/ 42 /KP.04.6/1/2024

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Negeri Bobong tahun 2024 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Negeri Bobong dalam rangka mewujudkan visi yakni :

“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Bobong Yang Agung “

Dengan misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bobong ;
2. Memberikan kinerja pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan ;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Negeri Bobong ;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Bobong ;

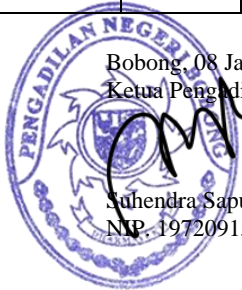
Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2024 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir :

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI BOBONG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		Jumlah yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	25%	25%	30%	50%
		Persentase Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	75%	75%	80%
		Persentase Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	75%	75%	80%
		Persentase Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi.	100%	100%	100%	100%
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap layanan Peradilan.	100%	100%	100%	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu.	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi.	50%	50%	50%	50%

3.	Meningkatkan Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Presentase perkara Prodeo yang diselesaikan	-	-	-	-
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	-	-	-	-
		Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	100%	100%	100%	100%

No	Uraian Umum Kegiatan	Program	Out/Keluaran	Dana (Rp)	Jadwal Realisasi			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1.	Dukungan Manajemen Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Umum Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah Inventaris Perkantoran CPNS	Pengadaan Inventaris CPNS (Meja dan Kursi)	2,462,000	100%	100%	100%	100%
		Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2,792,546,000	100%	100%	100%	100%
		Layanan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,591,152,000	100%	100%	100%	100%
2	Dukungan Manajemen Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Pengadaan Alat Pengolah Data 2 Unit Printer	10,000,000	100%	100%	100%	100%
			Belanja Peralatan dan Mesin Meubelair	600,000,000	100%	100%	100%	100%
			Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	19,683,527,000	100%	100%	100%	100%
3.	Peningkatan Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Percepatan penyelesaian Perkara Dukungan Penyelesaian Perkara	Pengawasan dan Pengamatan (KIMWASMAT)	1,500,000	100%	100%	100%	100%
4.	Perkara Hukum Perorangan	Perkara Pidana Yang Di Selesaikan Di Tingkat Pertama Di Wilayah Timur	Pendaftaran Berkas Perkara	17,920,000	100%	100%	100%	100%
			Penetapan Hari Sidang	1,250,000	100%	100%	100%	100%
			Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	2,500,000	100%	100%	100%	100%
			Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan	12,500,000	100%	100%	100%	100%
			Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	2,500,000	100%	100%	100%	100%
			Minutasi/Upaya Hukum	1,250,000	100%	100%	100%	100%
			Penanganan Perkara Banding di Tingkat Pertama	750,000	100%	100%	100%	100%
			Penanganan Perkara Kasasi dan PK di Tingkat Pertama	330,000	100%	100%	100%	100%
5.	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Layanan Pos Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Umum	Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)	24,000,000	100%	100%	100%	100%



Bobong, 08 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Bobong,

Suhendra Saputra,SH.,MH.
NIP. 197209152005021001



PENGADILAN NEGERI BOBONG KELAS II

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG KELAS II
NOMOR : W28-U6/ 39 /KP.04.6/01/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA AKSI TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penerapan reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Yang Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Bobong, khususnya yang berkaitan dengan penguatan area akuntabilitas serta implementasi manajemen kinerja, perlu dilakukan tahapan dan langkah-langkah sebagaimana pedoman yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI ;
- b. Bahwa dokumen Rencana Aksi Tahun 2024 perlu diperbaharui dan disusun berdasarkan kondisi riil yang ada pada Pengadilan Negeri Bobong ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu di bentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Bobong;
- d. Bahwa para pejabat/pegawai yang ditunjuk dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas yang diberikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI TAHUN 2024.**
- Kesatu : Menetapkan Tim Penyusun Dokumen Rencana Aksi Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Bobong dengan susunan sebagaimana disebut dalam surat lampiran surat keputusan ini ;
- Kedua : Tim bertugas dan bertanggungjawab untuk menyusun dan menyelesaikan Dokumen Rencana Aksi Tahun 2024 ;
- Ketiga : Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahun 2024 sebagaimana disebutkan pada diktum Kedua tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan hasilnya diinput melalui e-sakip Mahkamah Agung pada Aplikasi KOMDANAS;

- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bobong

Pada tanggal : 05 Januari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Bobong,



Suhendra Saputra,SH.,MH.

NIP.197209152005021001

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bobong
Nomor : W28-U6/ 39 /KP.04.6/01/2024
Tangg1 05 Januari 2024
Tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Aksi Tahun 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA AKSI TAHUN 2024

No	Nama	NIP	Jabatan	Tugas
1	2	3	4	5
1.	Abd Samad Ma'bud,SH.	197004051992031004	Panitera	Ketua Tim
2.	Budystira M. Tofan,SH.	198001292002121001	Sekretaris	Wakil Ketua
3.	Sukiman, A.Md	198311112009041007	Kasubag PTIP	Anggota
4.	M. Ikhsan Sadar Alam,SH.	197803082012121005	Panmud Pidana	Anggota
5.	Arif Tenga,SH.	198110022009121003	Panmud Hukum	Anggota
6.	La Ode Harjet Ode Isa, S.Si	198707292010011003	Kasubag Ortala	Anggota
7.	Badarudin La Ode, S.Ip	197704092010121001	Jurusita	Anggota
8.	Rizky Elevent Threere	199311032020121003	JSP	Anggota
9.	Fandi Umasangadji	-	PPNPN	Anggota
10.	Salman Umawaitina	-	PPNPN	Anggota



Ketua Pengadilan Negeri Bobong,

Suhendra Saputra, SH.,MH.
NIP. 197209152005021001

